

ABSTRAK

Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teregulasi atau *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara dewasa ini. Fakta menunjukkan bahwa 30% dari hasil tangkapan ikan dunia terkoneksi dengan aktivitas ilegal, dimana satu pertiga dari aktivitas ilegal tersebut terjadi di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana aktivitas penangkapan ikan secara ilegal menjadi hal yang sangat inheren dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dibutuhkan upaya kolektif untuk menyelesaikannya. Pada tahun 2009, *Port State Measurement Agreement* hadir sebagai sebuah kerjasama global dan bersifat mengikat yang berbeda dari tren kerjasama perikanan regional di beberapa dekade terakhir. Dengan menggunakan teori rezim internasional beserta pendekatan kepentingan (*interest-based approach*) penulis berusaha untuk melihat bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam rezim kerjasama PSMA dipengaruhi oleh kepentingan Indonesia dalam menyelesaikan beberapa isu penting yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Penelitian ini akan terbagi menjadi tiga aspek besar yakni ekonomi, keamanan dan lingkungan sebagai garis besar dalam menganalisis kepentingan tersebut. Tulisan ini kemudian sampai pada kesimpulan bahwa kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan terkait penangkapan ikan secara ilegal bersamaan dengan ketidakefektifan pendekatan domestik dalam menyelesaikannya menjadi dorongan terbesar untuk masuk dalam PSMA.

Kata Kunci: Port State Measurement Agreement, Penangkapan ikan ilegal, Illegal Unregulated, Unreported Fishing, Rezim Internasional, Indonesia, IUUF.

ABSTRACT

Illegal, Unreported and Unregulated fishing is one of the main problems faced by many countries today. Almost 30% of the world's fish catches are connected with illegal activities at sea, where one third of these illegal activities occur in Indonesian waters. This fact shows how illegal fishing activities become so inherent in daily life that collective efforts are needed to solve this problem. In 2009, Port State Measurement Agreement (PSMA) under the FAO was made as a global and binding partnership in eradicating IUU fishing which makes it different from regional fisheries cooperation organization (RFMO) that has become a trend for the past decades. By using international regime theory along with interest-based approach, this research



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Kepentingan Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Port State Measurement Agreement (PSMA)

dalam Memberantas Kasus Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF)

ULLY SHARA LUMBAN T, Usmar Salam, M.Int.Stu

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

tries to seek how Indonesia's participation in PSMA is influenced by Indonesia's interest in resolving several important issues related to illegal fishing activities. This research will be divided into three broad aspects namely economic, security and the environment as an outline to analyze these interests. In conclusion, this research argues that the need to solve major IUUF related problems along with ineffective domestic approach to solve these problems becomes Indonesia's biggest push to join PSMA.

Keywords: Port State Measurement Agreement, Illegal Unregulated, Unreported Fishing, International Regime, Indonesia, IUUF,